|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian  | : | Metro Sulawesi | KasubaudSulteng I |
| Hari, tanggal | : | Senin, 24 November 2014 |
| Keterangan | : | Perlu adanya standar biaya pembentukan Perda |
| Entitas | : | Provinsi |

**Palu, Metrosulawesi.com -**  Anggota DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Yahdi Basma mengusulkan perlunya langkah konkret DPRD Sulteng dan Pemprov mendesain standar biaya pembentukan peraturan daerah (perda). Menurutnya, selama ini nyata boros atau inefisiensi anggaran.

Dia mencontohkan, satu buah perda, bisa jadi habiskan Rp200 sampai Rp 400 juta. Jika diprogramkan 10 perda, maka dana APBD yang digelontorkan mencapai Rp 2 sampai Rp4 miliar.

“Solusi, pemerintah pusat mesti menata ulang mekanisme pembahasan ranperda dengan terbitkan regulasi tentang itu,” ungkap anggota Komisi I DPRD Sulteng ini kepada wartawan, Senin (24/11/2014).

Solusi kedua, kata politisi Nasdem ini, DPRD mesti bahas perda secara kolektif, minimal randum, tidak satu per satu  seperti selama ini.

“Maka anggaran perjalan dinas Anggota DPRD (Badan Pembentukan Perda, dulu Baleg), bisa ditekan minimum. Bayangkan jika 10 anggota Baperda, sekali ke Jakarta Rp 15 juta, maka butuh Rp150 juta hanya untuk konsultasi di Kementerian terkait,” kata anggota Komisi Politik, Hukum dan Pemerintahan DPRD Sulteng ini.